

Strategi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI Dalam Penyiapan dan Pembekalan Satgas Force Head Quarter Support Unit (FHQSU) pada Misi PBB UNIFIL

Stevanus Piay¹ Haryo Mustoko² Jimmy Veni Tokio Tiwow³

Universitas Pertahanan Republik Indonesia^{1,2,3}

Email: steve.chk.sa@gmail.com¹ haryosyifa69@gmail.com² jtiwow3@gmail.com³

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang pasukan terbesar dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dan sejak tahun 2008 secara konsisten mengirimkan Satuan Tugas Force Head Quarter Support Unit (FHQSU) sebagai unsur pendukung operasional Markas Besar UNIFIL di Naqoura, Lebanon Selatan. Kualitas penyiapan dan pembekalan personel oleh Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (PMPP TNI) menjadi faktor penentu keberhasilan misi. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi PMPP TNI dalam penyiapan dan pembekalan Satgas FHQSU serta mengevaluasi efektivitasnya, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus fenomenologi melalui wawancara mendalam terhadap pejabat PMPP TNI, Komandan Satgas FHQSU, dan personel kunci yang diperkuat studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi PMPP TNI mencakup seleksi personel berbasis kompetensi multidimensi meliputi kesehatan fisik dan psikologis, profesionalisme teknis, kemampuan bahasa, serta rekam jejak disiplin, yang kemudian dilanjutkan dengan Pre-Deployment Training (PDT) yang mengintegrasikan Core Pre-Deployment Training Material (CPTM) dan Specialized Technical Module (STM) mencakup hukum internasional, hak asasi manusia, kesadaran budaya lokal, latihan simulatif, dan komunikasi multinasional. Meskipun personel FHQSU mampu mempertahankan kinerja yang konsisten, terdapat kesenjangan antara standar ideal dan realitas lapangan pada aspek spesialisasi teknis, kemampuan bahasa, dan adaptasi budaya yang diatasi melalui pelatihan tambahan, pendampingan senior, dan mekanisme After Action Review (AAR). Penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem pemetaan kompetensi berbasis teknologi informasi serta penguatan evaluasi kinerja yang adaptif guna meningkatkan efektivitas Satgas FHQSU pada misi mendatang.

Kata Kunci: PMPP TNI; FHQSU; UNIFIL; Strategi Penyiapan; Pre-Deployment Training

Abstract

Indonesia is one of the largest troop-contributing countries to the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) and has consistently deployed the Force Head Quarter Support Unit (FHQSU) Task Force since 2008 as a key operational support element of UNIFIL Headquarters in Naqoura, South Lebanon. The quality of personnel preparation and training by the Indonesian National Armed Forces Peacekeeping Mission Center (PMPP TNI) is a critical determinant of mission success. This study aims to analyze the strategy of PMPP TNI in preparing and training the FHQSU Task Force and to evaluate its effectiveness, employing a qualitative phenomenological case study approach through in-depth interviews with PMPP TNI officials, the FHQSU Task Force Commander, and key personnel, supported by literature review. The findings reveal that PMPP TNI's strategy encompasses multidimensional personnel selection covering physical and psychological fitness, technical professionalism, language proficiency, and disciplinary record, followed by Pre-Deployment Training (PDT) integrating Core Pre-Deployment Training Material (CPTM) and Specialized Technical Module (STM) addressing international law, human rights, local cultural awareness, field simulation, and multinational communication. Although FHQSU personnel maintain consistent performance, gaps between ideal standards and field realities persist in technical specialization, language skills, and cultural adaptation, addressed through supplementary training, senior mentoring, and After Action Review (AAR) mechanisms. This study recommends developing an information technology-based competency mapping system and strengthening adaptive performance evaluation to enhance the operational effectiveness of the FHQSU Task Force in future missions.

Keywords: PMPP TNI; FHQSU; UNIFIL; Preparation Strategy; Pre-Deployment Training



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam tatanan global kontemporer, upaya menjaga perdamaian dan keamanan internasional merupakan tanggung jawab kolektif seluruh negara berdaulat yang diformulasikan melalui United Nations Charter sebagai landasan normatif berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 (United Nations, 2008). Indonesia, sebagai bagian dari komunitas internasional dan berlandaskan pada amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan komitmen negara dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, telah secara aktif dan konsisten berpartisipasi dalam berbagai misi pemeliharaan perdamaian PBB sejak tahun 1956. Lebanon, sebuah negara di Timur Tengah yang berbatasan dengan Suriah di utara dan timur serta Israel di selatan, telah lama menjadi arena konflik bersenjata yang kompleks. Konflik antara kelompok Hezbollah dan Israel yang mencapai puncaknya pada Juli-Agustus 2006 mengakibatkan lebih dari 1.150 korban jiwa di pihak Lebanon dan mendorong Dewan Keamanan PBB menerbitkan Resolusi Nomor 1701 Tahun 2006 yang memperkuat mandat United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) sekaligus meningkatkan jumlah pasukan perdamaian di Lebanon Selatan hingga 15.000 personel.



Gambar 1. Peta wilayah negara Lebanon

Indonesia merespons amanat internasional tersebut dengan mengirimkan Kontingen Garuda XXIII-B/UNIFIL pada tahun 2007, diikuti oleh pengiriman Satuan Tugas Force Head Quarter Support Unit (FHQSU) pada tahun 2008 di bawah pimpinan Kolonel Marinir F. Saud Tambatua sebagai Komandan Satgas pertama. Pengiriman FHQSU menandai babak baru kontribusi Indonesia karena untuk pertama kalinya Indonesia tidak hanya bertugas sebagai pasukan sektor lapangan, tetapi juga dipercaya mengelola dan mendukung operasional markas besar misi PBB secara langsung. Situasi Lebanon semakin kompleks dengan meletusnya kembali konflik bersenjata antara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dan Hezbollah pada tanggal 2 Maret 2026, menyusul serangan AS-Israel terhadap Teheran yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran. Kondisi ini memperkuat urgensi kajian mendalam terhadap strategi penyiapan dan pembekalan yang diterapkan oleh PMPP TNI selaku lembaga yang bertanggung jawab atas persiapan seluruh kontingen peacekeeping Indonesia. Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, PMPP TNI bertugas menyelenggarakan perencanaan organisasi, seleksi, pemberangkatan, penerimaan, evaluasi, pelatihan, perencanaan dukungan administrasi dan logistik operasi untuk Satgas TNI yang tergabung dalam kontingen Garuda, Pengamat Militer, Staf Militer, dan penugasan lainnya. Dengan demikian, PMPP TNI merupakan aktor kunci dalam

rantai penyiapan peacekeeper Indonesia. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek terkait partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian PBB. Soegeng et al. (2021) menganalisis strategi penempatan perwira tinggi Indonesia dalam posisi komando divisi di MONUSCO dalam kerangka diplomasi pertahanan. Sriyanto (2022) membahas kapabilitas pasukan perdamaian Indonesia di Republik Demokratik Kongo. Handoyo dan Muslim (2024) mengkaji strategi peningkatan kualitas SDM sebagai pasukan perdamaian di PMPP TNI. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik memfokuskan kajiannya pada strategi penyiapan dan pembekalan Satgas FHQSU. Research gap yang teridentifikasi adalah belum adanya kajian yang secara komprehensif menganalisis strategi PMPP TNI khusus untuk Satgas FHQSU dengan mengintegrasikan analisis *das sollen* dan *das sein*, mekanisme evaluasi berkelanjutan, serta adaptasi strategi terhadap kompleksitas operasi multinasional. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pemetaan gap antara standar ideal PBB dengan realitas kapasitas personel TNI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang menurut Jennifer Mason (2002) merupakan metode analisis, penjelasan, dan pembangunan argumen yang melibatkan pemahaman tentang kompleksitas, detail, dan konteks. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa objek penelitian ini berkaitan erat dengan pengalaman subjektif para aktor yang terlibat dalam strategi penyiapan dan pembekalan Satgas FHQSU. Desain penelitian yang digunakan adalah fenomenologi, yaitu pendekatan filosofis yang menyelidiki pengalaman manusia dan bermakna sebagai metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis, kritis, tidak berdasarkan apriori atau prasangka, dan tidak dogmatis (Hadi, Asrori, & Rusman, 2021). Penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi utama, yaitu Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia dan Universitas Pertahanan Republik Indonesia, selama periode Maret 2025 hingga Juni 2026. Penentuan subjek penelitian dilakukan secara purposive sesuai rekomendasi H. Zuchri Abdussamad (2021). Informan yang ditetapkan terdiri dari Kolonel Inf. Untung Prayitno selaku Direktur Pembinaan Operasi PMPP TNI sebagai informan kunci, Letkol Inf Sandy Wijaya selaku Kabagops Ditbinops PMPP TNI, Mayor Laut (P) Mohan Syafa'at selaku Pasiops Ditbinlat PMPP TNI, serta Mayor Laut (S) Chiven Sondakh selaku Kasipamops Satgas FHQSU.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kombinasi wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Wawancara dilaksanakan dengan memadukan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Studi kepustakaan mencakup pengumpulan data primer berupa hasil wawancara langsung dan data sekunder berupa dokumen, laporan penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik yang relevan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui metode triangulasi yang menurut Haryoko, Bahartiar, dan Arwadi (2020) merupakan suatu proses pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kinerja dan pengalaman individual serta perilaku institusi, mencakup studi kasus, analisis kesenjangan *das sollen*-*das sein*, serta penggunaan bahan dokumenter.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum UNIFIL dan Satgas FHQSU Indonesia

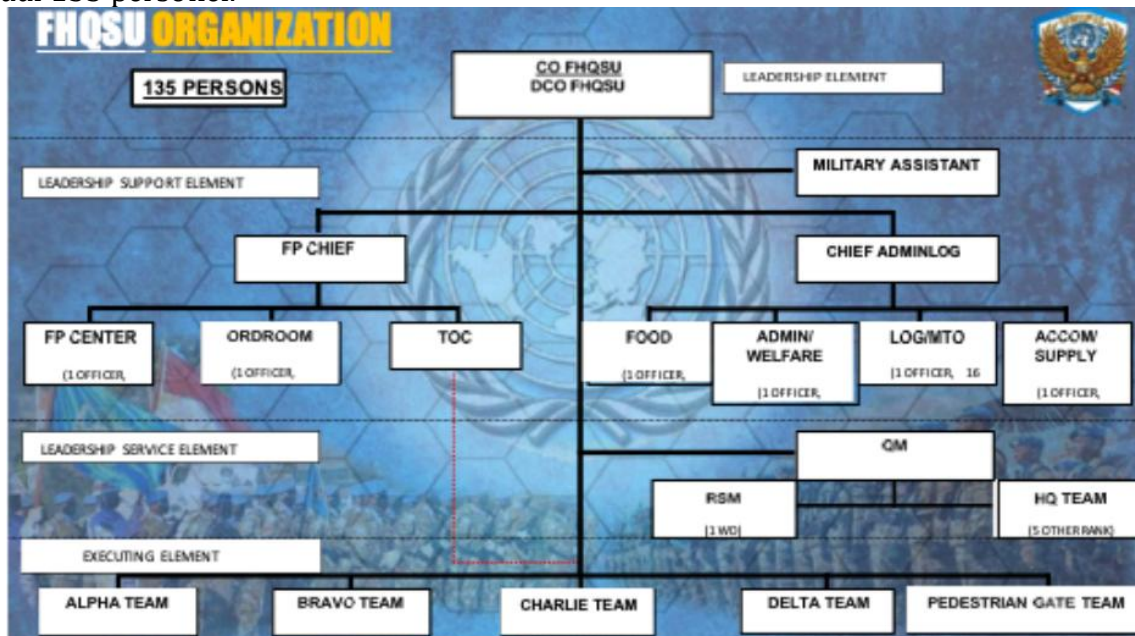
United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB pada tahun 1978 untuk mengonfirmasi penarikan pasukan Israel dari Lebanon, memulihkan

perdamaian, serta membantu Pemerintah Lebanon memulihkan otoritasnya di wilayah selatan. Mandat awalnya diperluas secara signifikan setelah konflik Israel-Hezbollah pada 2006 berdasarkan Resolusi DK PBB 1701.



Gambar 2. Deployment pasukan PBB di UNIFIL AoR

Sejak pertama kali dideploy pada tahun 2008, Satgas FHQSU Indonesia secara konsisten melaksanakan rotasi penugasan. Kekuatan awal sebesar 200 personel pada kontingen pertama (XXVI-A, 2008) mengalami pengurangan menjadi 50 personel pada sebagian besar rotasi berikutnya, kemudian meningkat kembali menjadi 155 personel pada rotasi XXVI-J* (2023) dan seterusnya. Pada tanggal 10 November 2025, Satgas FHQSU mengalami downsizing personel sebanyak 20 orang akibat kebijakan pemotongan anggaran PBB, sehingga kekuatan saat ini menjadi 135 personel.



Gambar 3. Struktur Organisasi FHQSU

Satgas FHQSU yang saat ini bertugas (XXVI-Q) dipimpin oleh seorang Perwira Menengah berpangkat Kolonel dengan komposisi 135 personel yang terdiri dari 10 Perwira, 45 Bintara, dan 80 Tamtama. Dari total 135 personel, Angkatan Darat mendominasi dengan 69 personel, diikuti Angkatan Laut dengan 38 personel dan Angkatan Udara dengan 14 personel, serta 14 personel wanita (Wan TNI) dari Angkatan Darat.

Strategi PMPP TNI dalam Penyiapan dan Pembekalan Satgas FHQSU Mekanisme Rekrutmen dan Seleksi Personel

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Kolonel Inf. Untung Prayitno selaku Direktur Pembinaan Operasi PMPP TNI, mekanisme rekrutmen dan seleksi personel untuk Satgas FHQSU dilaksanakan melalui enam tahapan yang terstruktur, bertahap, dan saling berkaitan. Tahap pertama adalah pengumuman dan pendaftaran, di mana informasi kebutuhan personel disampaikan melalui jalur komando kepada satuan-satuan di masing-masing matra. Tahap kedua adalah seleksi administrasi yang berfungsi sebagai mekanisme penyaringan awal yang bersifat objektif, meliputi kelengkapan dokumen administratif, riwayat penugasan, kondisi kesehatan, catatan disiplin, serta kemampuan bahasa asing. Tahap ketiga adalah seleksi psikologi dan kesehatan. Norma kelulusan menetapkan bahwa status kesehatan umum minimal Stakes II, status kesehatan jiwa Masih Memenuhi Syarat (MMS), skor ADFELP minimal flat 5 untuk perwira, dan skor ALCPT minimal 50 untuk bintara dan tamtama. Tahap keempat adalah seleksi kemampuan teknis dan profesional mencakup pemeriksaan kesehatan umum, bahasa Inggris, kemampuan komputer, mengemudi kendaraan roda empat stir kiri double gardan, serta kesegaran jasmani. Tahap kelima adalah pelatihan dan pembekalan pra-penugasan yang diberikan kepada personel yang telah dinyatakan lolos seluruh tahapan seleksi. Tahap keenam adalah penetapan dan pengiriman, di mana personel ditetapkan secara resmi melalui keputusan otoritas yang berwenang sebelum diberangkatkan ke Lebanon.

Pre-Deployment Training (PDT) sebagai Instrumen Strategis

Pre-Deployment Training (PDT) yang diselenggarakan oleh PMPP TNI merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sekaligus pemenuhan standar pelatihan PBB yang ditetapkan melalui United Nations Department of Peace Operations (UN DPO). Pelaksanaan PDT oleh PMPP TNI dirancang dalam empat minggu terstruktur. Pada dua minggu pertama, peserta wajib menerima materi CPTM yang ditetapkan UN DPO, mencakup 43 modul wajib mulai dari prinsip-prinsip dasar pemeliharaan perdamaian, mandat misi PBB, hukum humaniter internasional, hak asasi manusia, Protection of Civilians, hingga kode etik dan disiplin personel PBB. Selain materi CPTM standar PBB, PMPP TNI juga memberikan 18 modul pembekalan tambahan yang bersifat wajib. Pada minggu ketiga, peserta Satgas FHQSU diberikan Mission Specific Training (MST) yang difokuskan pada pemahaman mandat misi UNIFIL, struktur organisasi dan mekanisme kerja di Markas Besar UNIFIL, situasi keamanan dan perkembangan terkini di Lebanon Selatan, budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, serta prosedur operasional yang mencakup 15 topik spesifik. Pada minggu keempat, seluruh peserta mengikuti kegiatan aplikasi lapangan (field training exercise) yang merupakan puncak dari rangkaian PDT, di mana peserta dituntut untuk mengaplikasikan CPTM dan MST secara terpadu dalam berbagai skenario yang dirancang menyerupai kondisi nyata di daerah misi.

Sistem Pembelajaran Berkelanjutan (Continuous Learning System)

Salah satu aspek paling inovatif dari strategi PMPP TNI adalah pengembangan sistem pembelajaran berkelanjutan yang mencakup beberapa dimensi. Dimensi pertama adalah peningkatan kemampuan bahasa asing melalui penyelenggaraan Kursus Bahasa Inggris bagi calon personel misi perdamaian, sehingga peserta dapat lebih fokus pada pemahaman materi misi selama PDT. Dimensi kedua adalah pelibatan calon peacekeepers dalam berbagai kursus, latihan, seminar, dan kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan jauh sebelum personel ditetapkan sebagai peserta PDT, mencakup United Nations Military Observer Course (UNMOC), United Nations Staff Officer Course (UNSOC), Civil-Military Coordination (CIMIC),

Protection of Civilians (POC), dan berbagai kursus lainnya. Dimensi ketiga adalah transfer ilmu, pengalaman, dan pengetahuan (lessons learned) dari satuan tugas yang sedang bertugas atau yang baru kembali kepada satuan tugas pengganti. Pendekatan berlapis (layered training system) ini merupakan wujud nyata dari konsep continuous learning system dalam manajemen sumber daya manusia militer.

Efektivitas Strategi PMPP TNI

Secara normatif, standar ideal penugasan personel dalam misi UNIFIL mensyaratkan kualifikasi teknis dan pengalaman spesialisasi yang sangat spesifik. Standar ideal PBB menetapkan empat kriteria utama: (1) kualifikasi dan pengalaman spesialisasi yang mensyaratkan kesesuaian penuh antara latar belakang pendidikan, keahlian teknis, dan posisi yang akan ditempati; (2) kemampuan bahasa dan komunikasi yang memadai dalam bahasa Inggris, Prancis, atau Arab; (3) distribusi personel yang presisi berdasarkan kebutuhan setiap posisi; serta (4) pengalaman pra-penugasan dan adaptasi budaya yang memadai.

Realitas Lapangan

Pada realitanya, terdapat sejumlah kesenjangan antara standar ideal PBB dengan kondisi aktual personel TNI yang dikerahkan. Pada aspek kualifikasi dan pengalaman spesialisasi, pemenuhan kualifikasi personel TNI belum sepenuhnya sejalan dengan standar ideal UNIFIL. Sebagian personel yang dikirim memiliki kualifikasi yang relevan secara umum namun tidak sepenuhnya spesifik sesuai posisi yang dibutuhkan. Pada aspek kemampuan bahasa, penguasaan personel TNI menunjukkan tingkat yang tidak seragam. Sebagian personel masih memiliki keterbatasan dalam komunikasi aktif, khususnya dalam diskusi teknis, penyusunan laporan resmi, dan interaksi informal dengan kontingen negara lain. Pada aspek distribusi personel, tidak semua posisi spesifik dapat diisi sesuai kualifikasi ideal, sehingga sebagian personel harus menjalankan peran ganda atau tugas tambahan.

Mekanisme Penjembatan Kesenjangan

PMPP TNI telah mengembangkan serangkaian mekanisme terstruktur untuk meminimalkan kesenjangan antara das sollen dan das sein. Terdapat lima mekanisme penjembatan utama: (1) analisis kebutuhan dan evaluasi personel yang komprehensif; (2) pelatihan tambahan dan penguatan kompetensi yang dirancang secara individual; (3) pendampingan dan mentoring di lapangan oleh personel senior; (4) rekonsiliasi distribusi personel melalui penyesuaian internal yang fleksibel; dan (5) evaluasi berkelanjutan yang memungkinkan langkah korektif adaptif.

Mekanisme Evaluasi Pasca-Penugasan dan Pembelajaran Organisasi

Strategi PMPP TNI tidak hanya berfokus pada pra-penugasan, tetapi juga mencakup mekanisme evaluasi pasca-penugasan yang sistematis dan menyeluruh. Proses ini diawali dengan penyusunan laporan purna tugas oleh Komandan FHQSU bersama personel kunci yang memuat pencapaian misi, kendala yang dihadapi di lapangan, upaya penyelesaian masalah, serta saran pengembangan untuk rotasi berikutnya. Setelah laporan purna tugas, PMPP TNI menyelenggarakan After Action Review (AAR) yang melibatkan Komandan FHQSU, perwira senior, dan instruktur terkait. Mekanisme AAR menjadi ruang diskusi mendalam mengenai pengalaman lapangan, termasuk dinamika koordinasi multinasional, penerapan standar dan prosedur PBB, serta tantangan teknis maupun non-teknis yang muncul selama penugasan. Hasil evaluasi dirumuskan dalam rekomendasi strategis yang mencakup penyempurnaan kurikulum pelatihan, penambahan materi atau latihan tertentu, perbaikan SOP, peningkatan

sistem komunikasi, serta penguatan kesiapan personel. Mekanisme evaluasi yang diterapkan PMPP TNI berfungsi sebagai sarana institutional learning yang meningkatkan profesionalisme dan efektivitas operasional.

Efektivitas Strategi: Analisis Komprehensif

Berdasarkan analisis menyeluruh terhadap data yang terhimpun dari seluruh informan, efektivitas strategi PMPP TNI dalam mendukung keberhasilan misi FHQSU di UNIFIL dapat dievaluasi dari beberapa dimensi yang saling berkaitan. Dari perspektif profesionalisme dan kompetensi teknis, strategi PMPP TNI mendukung peningkatan kemampuan individu dan tim melalui penguatan penguasaan teknik dan prosedur kecabangan, penerapan materi inti CPTM, serta kemampuan pengambilan keputusan secara mandiri maupun kolaboratif. Dari perspektif evaluasi kinerja oleh PBB, kinerja yang dipandang baik oleh PBB dan Force Commander UNIFIL menjadi indikator kualitatif penting. Tingginya tingkat disiplin, kesiapan operasional yang konsisten, dan minimnya pelanggaran etika menunjukkan bahwa personel mampu menginternalisasi nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab moral yang dibekali selama PDT. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian. Ketidakseimbangan antara durasi PDT yang relatif singkat (sekitar satu bulan) dengan banyaknya materi wajib yang harus dikuasai merupakan tantangan utama. Kondisi ini berisiko menciptakan information overload di mana peserta hanya memahami materi pada tingkat konseptual tanpa memiliki kesempatan yang cukup untuk menginternalisasi dan mengaplikasikannya secara mendalam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis secara mendalam, terdapat dua temuan utama yang menjawab rumusan masalah penelitian ini. Temuan pertama menunjukkan bahwa strategi PMPP TNI dalam penyiapan dan pembekalan Satgas FHQSU merupakan sistem yang terstruktur dan multidimensional, dimulai dari evaluasi dan pemetaan kompetensi personel yang mencakup penilaian kualifikasi, pengalaman, kemampuan bahasa, dan spesialisasi teknis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kapasitas aktual dan standar ideal PBB. Strategi ini dilanjutkan dengan pelaksanaan Pre-Deployment Training yang mengintegrasikan 43 modul wajib CPTM standar PBB, 18 modul pembekalan tambahan, Mission Specific Training untuk FHQSU, dan aplikasi lapangan komprehensif selama empat minggu. Inovasi utama strategi PMPP TNI terletak pada pengembangan continuous learning system yang mencakup kursus bahasa intensif, pelibatan dalam berbagai kursus dan latihan spesialis, serta transfer pengetahuan dari Satgas sebelumnya. Temuan kedua menunjukkan bahwa efektivitas strategi PMPP TNI dapat dipahami sebagai hasil dari keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya manusia yang konsisten sepanjang siklus penugasan. Strategi terbukti efektif dalam membentuk personel yang mampu melaksanakan mandat PBB secara profesional, menjaga stabilitas keamanan di daerah penugasan, dan mendapatkan penilaian positif dari Force Commander UNIFIL. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan yang tidak dapat sepenuhnya dieliminasi antara das sollen dan das sein, terutama pada aspek spesialisasi teknis, kemampuan bahasa, distribusi personel sesuai kebutuhan posisi, dan adaptasi budaya. Implikasi praktis penelitian ini berupa rekomendasi kepada PMPP TNI untuk mengembangkan sistem pemetaan kompetensi berbasis teknologi informasi yang memuat rekam jejak penugasan, sertifikasi, kemampuan bahasa, dan spesialisasi teknis. Pelatihan pra-penugasan perlu ditingkatkan melalui simulasi kondisi nyata yang lebih realistis, penguatan soft skills, serta pengembangan platform pembelajaran daring. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji perbandingan efektivitas strategi penyiapan Indonesia dengan TCC lainnya dalam misi UNIFIL guna memperoleh perspektif komparatif yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Creswell, J. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative*. London: SAGE Publications.
- Fiantika, F., & al, e. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Hadi, A., Asrori, & Rusman. (2021). *Penelitian Kualitatif: Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Banyumas: CV. Pena Persada.
- Handoyo, H., & Muslim, M. A. (2024). *Diplomasi Publik Indonesia melalui Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sebagai Pasukan Perdamaian di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (PMPP TNI)*. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*, 8(3).
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1000/XII/2015 tentang Petunjuk Tekhnis Seleksi Personel Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia.
- Martani, W., Sumertha, I., & Hidayat, E. (2020). *Peran Standby Force Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI) Dalam Mempersiapkan Pasukan pada Misi Pemeliharaan Perdamaian*. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 6(1), 51-74.
- Mason, J. (2002). *Qualitative Researching*. London: SAGE Publications.
- Mintzberg, H., Lampel, J., Quinn, J., & Ghoshal, S. (2003). *The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases*. New Jersey: Pearson Education Inc.
- Pahlevi, C., & Musa, M. (2023). *Manajemen Strategi*. Makassar: Penerbit Karya Nusantara.
- Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 199*.
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 175*.
- Priyanto. (2024). *Manajemen Strategi Militer*. Garut: CV. Aksara Global Akademia.
- Ramsbotham, O., Miall, H., & Woodhouse, T. (1999). *Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts*. Cambridge: Polity.
- Rhoads, E. (2019). *Putting Human Rights Up Front: Implications for Impartiality and The Politics of UN Peacekeeping*. *International Peacekeeping*, 26(3), 281-301.
- Soegeng, Pedrason, R., Sumarlan, S., & Hermawan, T. (2021). *Arrangement of the Position of Division Command for Higher Officers in the MONUSCO United Nations Mission in the Framework of Strengthening Indonesia Defence Diplomacy*. *International Journal of Education and Social Science Research*, 4(4), 80-104.
- Sriyanto. (2022). *Kapabilitas Pasukan Perdamaian Indonesia di Republik Demokratik Kongo*. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 8(1).
- Sudiantini, D. (2022). *Manajemen Strategi*. Banyumas: CV. Pena Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156*.
- United Nations. (2008). *United Nations Peacekeeping Operations Principles and Guidelines*. New York: United Nations.
- United Nations. (2024). *The Future of Peacekeeping New Models, and Related Capabilities*. New York: United Nations.
- Woodhouse, T. (2020). *Peacekeeping and International Conflict Resolution*. Williamsburg: Peace Operations Training Institute.



- Yin, R. (2016). *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Guilford Press.
- Yuninda, E., Yusgiantoro, P., Widodo, P., & Pedrason, R. (2025). Pengembangan Konsep Diplomasi Pertahanan Dan Implementasinya Dalam Pengiriman Kontingen Garuda TNI pada Misi Operasi Pemeliharaan Perdamaian Dunia. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 9(1), 419-430.